



KR-Surya Adi Lesmana

MENANTI WAKTU BERBUKA: Masyarakat menanti datangnya waktu berbuka puasa dengan beragam cara, salah satunya dengan bersantai di Alun-alun Selatan Kraton Yogyakarta, Senin (18/3/2024). Selain menawarkan berbagai wahana yang digemari anak-anak, tempat ini banyak pilihan menu berbuka puasa dengan harga terjangkau sehingga selalu ramai dikunjungi masyarakat.

MENKEU LAPORKAN KE KEJAGUNG

Korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Tembus Rp 2,5 T

JAKARTA (KR) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Senin (18/3), mendatangi Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung). Menkeu bermaksud melaporkan dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang nilainya mencapai Rp 2,5 triliun.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengaku menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana pada LPEI yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani. "Pada hari ini kami kedatangan Bu Menteri Keuangan, memang ada beberapa hal yang kami bahas tadi antara lain dugaan tindak pidana korupsi atau fraud (kecurangan) dalam pemberian fasilitas kredit LPEI," ungkapnya.

Burhanuddin menjelaskan dugaan ini sudah cukup lama diteliti melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara (Jamdatun) dan baru hari ini Menkeu resmi melaporkannya. Berdasarkan penjelasan Menkeu, LPEI membentuk tim terpadu bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jamdatun Kejaksaan Agung dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu yang meneliti

kredit-kredit bermasalah di LPEI. Dari hasil penelitian tersebut terindikasi adanya fraud atau kecurangan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh empat debitur.

Burhanuddin mengatakan, untuk tahap pertama ini adalah empat debitur yang dilaporkan oleh Kemenkeu yang diduga terindikasi melakukan fraud dengan nilai total Rp 2,505 triliun. "Jadi untuk tahap pertama Rp 2,5 triliun dengan nama debiturnya (perusahaan) RII sekitar Rp 1,8 triliun, PT SMR Rp 216 miliar, PT SRI Rp 1,44 miliar, PT BRS Rp 300,5 miliar. Jumlah keseluruhannya total Rp 2,505 triliun," kata Burhanuddin.

Menkeu Sri Mulyani membenarkan menerima laporan hasil penelitian terhadap kredit bermasalah di LPEI. "Kami menyampaikan hasil pemeriksaan dari tim terpadu tersebut terha-

dap kredit bermasalah yang terindikasi adanya fraud, yaitu dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh debitur tersebut," katanya.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebut dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan empat debitur perusahaan, yang sudah terdeteksi sejak lama, yakni sekitar 2019. "Dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang mana sebenarnya tindakan ini sudah cukup lama," katanya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Ketut Sumeda menambahkan, dugaan ini hasil temuan yang dilakukan oleh tim gabungan LPEI bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara (Jamdatun) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. "Ini adalah temuan dari 3 tim gabungan ya, tadi sudah jelaskan tadi, yaitu ada BPKP, ada Jamdatun dan Inspektorat Keuangan yang ada di Kementerian Keuangan," jelasnya.

(Ant/Has)-d

SOAL LAYANAN KEAGAMAAN INKLUSIF DI KUA

Menag Diminta Kaji Secara Komprehensif

JAKARTA (KR) - Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama (Menag) agar melakukan kajian komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan berkenaan dengan rencana kebijakan layanan keagamaan inklusif di Kantor Urusan Agama (KUA).

"Komisi VIII meminta Menag menindaklanjuti masukan pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, yakni melakukan kajian komprehensif melibatkan berbagai pemangku kepentingan tentang rencana kebijakan layanan keagamaan inklusif di KUA," kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam rapat kerja dengan Menag Yaqut Cholil Qoumas di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (18/3).

Saran tersebut pun merupakan salah satu kesimpulan dari rapat kerja itu. Sebelumnya, Menag Yaqut

telah menyampaikan, transformasi KUA sebagai pusat layanan semua umat beragama merupakan kelanjutan dari implementasi program revitalisasi KUA atau layanan keagamaan yang inklusif di KUA.

Salah satu contoh wujud revitalisasi KUA sebagai layanan keagamaan yang inklusif itu adalah KUA dapat menjadi tempat pernikahan semua pemeluk agama, bukan hanya umat Islam.

Dalam pelaksanaannya, kata Yaqut melanjutkan, layanan keagamaan inklusif di KUA tidak mengurangi peran lembaga keagamaan. Yaqut mengatakan peran-peran bernilai penting yang dijalankan oleh lembaga keagamaan atau tempat ibadah tetap pada porsinya.

Ia pun menyampaikan sejumlah tujuan revitalisasi KUA, antara lain memberikan kemudahan kepada

masyarakat dalam mengakses layanan yang diberikan pemerintah, terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan akses.

"Masyarakat non-Muslim yang selama ini melakukan pencatatan nikah di Dukcapil dan bertempat tinggal jauh dari pusat kabupaten/kota dapat dibantu dengan KUA yang dijadikan hub pelayanan atas pencatatan nikah. Artinya, KUA menjadi hub untuk dukcapil," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Yaqut juga menyampaikan beberapa hal yang diperhatikan Kemenag dalam mewujudkan pelayanan perkawinan di KUA bagi semua umat beragama. Di antaranya adalah memperhatikan kebutuhan umat beragama, kesiapan sumberdaya manusia (SDM) dan dukungan manajemen.

(Ant/Ati)-d

GEDUNG DPR AGAR DIBANGUN PALING AKHIR

IKN Jangan Pinggirkan Warga Setempat

JAKARTA (KR) - Anggota Komisi II DPR RI Guspari Gaus meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak meminggirkan masyarakat setempat yang sudah berdiam sejak lama di kawasan tersebut.

Ia mengatakan hal tersebut merespons isu dugaan pengusuran yang menyerpa warga setempat karena pembangunan IKN. Jangan sampai, IKN mencontoh pembangunan kota di negara lain yang menghilangkan keberadaan masyarakat asli setempat.

"Jangan masyarakat asli yang berada di situ dimarginalkan," kata Guspari saat rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Otorita IKN di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (18/3).

Pihaknya mempertanyakan keberadaan isu dugaan pengusuran tersebut. Jika benar, menurutnya, hal tersebut merupakan tindakan yang

memilukan dan memalukan. "Apa benar atau tidak, dan juga saya membaca juga suratnya ditarik dan sebagainya," ujarnya.

Ia mengaku menjadi salah satu panitia khusus (pansus) dan panitia kerja (panja) di DPR yang membahas pembuatan Undang-Undang IKN beberapa waktu lalu. Dalam pembahasan pembuatan undang-undang itu, ia mengatakan, DPR menekankan kepada pemerintah, IKN merupakan kota untuk semua.

"Jangan hanya sebuah kota, ibu kota, diperuntukkan hanya untuk orang tertentu saja," tegasnya.

Untuk itu, ia pun meminta Otorita IKN agar fokus kepada kebijaksanaan dan nilai-nilai luhur atas pemindahan ibu kota negara Indonesia, meskipun regulasinya sudah disahkan DPR.

Sementara itu, Anggota Komisi II

DPR RI Cornelis mengatakan, jangan sampai IKN membuat warga setempat menjadi seperti warga suku adat yang terpinggirkan di negara-negara lain. "Jangan seperti warga Aborigin di Australia, warga Indian di Amerika dan warga Viking di Eropa, nanti tinggal nama," tutur Cornelis.

Saat diberi kesempatan berbicara, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono pun memastikan, tidak ada pengusuran yang semena-mena dalam pembangunan IKN.

Sebagai kepala otorita, ia juga sudah menganggap, warga di sekitar IKN pun merupakan warganya. Bambang mengatakan, saat ini ia memiliki KTP dengan domisili Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, yang merupakan lokasi pembangunan IKN.

(Ant/Obi)-d

Hikmah Ramadan

Tiga Derajat Kualitas Puasa

Oleh: Muhamad Nasrudin

HUJJATUL Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin membongkar beberapa rahasia puasa di bulan Ramadan. Salah satunya tentang derajat kualitas puasa.

Al-Ghazali menjelaskan, kualitas puasa kita bisa diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan.

Pertama, puasa umum. Yakni, menjaga perut dan kemaluan dari pemenuhan atas syahwatnya. Menjaga perut artinya tidak makan dan minum. Menjaga kemaluan tentu saja dari aktivitas seksual. Hal ini dilakukan dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari.

Puasa jenis pertama ini kualitas umum atau standar minimum. Ketika seorang muslim mampu menunaikan puasa dengan baik dan menjaga dari segala hal yang membatalkan puasa, maka ia sudah memenuhi puasa *grade* standar ini.

Kedua, puasa khusus. Kualitas puasa jenis ini lebih istimewa. Puasa jenis ini dilakukan dengan dibarengi menjaga pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan segala anggota badan dari dosa dan maksiat.

Kita tahu, seluruh anggota tubuh tersebut sering kali melakukan perbuatan dosa. Telinga berdosa karena mendengar suara yang tidak diperbolehkan. Mulut berdosa dengan mengucapkan kalimat bohong, adu domba, dan *ghibah*. Begitu seterusnya.

Rasulullah saw bersabda, dari riwayat Anas bin Malik RA, "Lima perkara yang menghapus pahala puasa, yaitu berbohong, menggunjing, adu domba, memandang dengan syahwat, dan sumpah palsu." (HR Dailami).

Karena itu, menjaga anggota tubuh dari



segala perbuatan maksiat menjadikan kualitas puasa kita meningkat ke derajat kedua.

Ketiga, puasa khususnya khusus. *Grade* puasa ini paling istimewa. Ini adalah puasanya para auliya dan para nabi.

Bagaimana cara mereka berpuasa?

Para kekasih Allah swt berpuasa tidak hanya dengan menahan lapar dan dahaga serta berkata kotor. Tidak hanya anggota tubuh saja yang berpuasa, melainkan hati mereka juga berpuasa.

Bagaimana cara puasa hati itu?

Imam Al-Ghazali menuturkan, "yakni dengan menjaga hati dari desiran yang hina, pemikiran duniawi, dan utamanya menjaga hati dari terisi dengan selain Allah swt."

Jika puasa *grade* pertama bisa batal dengan makan dan minum, maka *grade* ketiga ini akan batal ketika dalam hati seseorang terbersit pemikiran tentang hal-hal selain Allah swt dan hari akhir.

Ini bukan berarti mereka mengabaikan urusan dunia sama sekali. Bukan begitu. Para kekasih Allah swt tetap memikirkan dunia, tapi bukan untuk kepentingan duniawi belaka.

Para nabi dan auliya tetap bekerja mengumpulkan harta duniawi setiap hari, tapi bukan untuk memperkaya diri, melainkan hanya sebatas untuk *sangu ngibadah*, bekal di akhirat kelak.

Semoga kita bisa meningkatkan kualitas ibadah puasa kita secara bertahap menuju kualitas yang paling istimewa. *Amin ya Rabbal alamin.* (*)-d

Muhamad Nasrudin,

Mahasiswa doktoral UIN Sunan Kalijaga.

Redaksi menerima sumbangan naskah Hikmah Ramadan.
Naskah bisa dikirim ke email naskahkr@gmail.com (Red)

TERKAIT BESARAN FEE MENANGKAN PROYEK

Mantan Walikota Bandung Kembali Diperiksa

JAKARTA (KR) - Pemeriksaan kembali dilakukan Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Walikota Bandung Yana Mulyana terkait patokan besaran fee bagi pihak swasta yang ingin memenangkan proyek pengadaan di lingkungan Pemkot Bandung. Penyidik juga memeriksa mantan Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung Khairur Rijal terkait perkara yang sama.

Keduanya, kata Kepala Bagian Pemberritaan KPK Ali Fikri, menjalani pemeriksaan pada Jumat (18/3) di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Dalam pemeriksaan seluruh saksi hadir dan memberikan keterangan. "Keterangan yang disampaikan di antaranya kaitan dugaan adanya pengaturan berbagai proyek di lingkungan Pemkot Bandung dengan memberikan patokan besaran fee atau setoran uang pada

para pihak swasta jika ingin dimenangkan," kata Ali Fikri di Jakarta, Senin (18/3).

Ia menjelaskan, hal yang sama juga dialami penyidik KPK dengan memeriksa Kasi Lalu Lintas Jalan Pada Bidang Lalu Lintas dan Perengklapan Jalan Dinas Perhubungan Kota Bandung Andri Fernando Sijabat, PPTK PJU/PJL Dishub Kota Bandung Yadi Haryadi, dan Kasubag Program Dishub Kota Bandung Roni Achamd.

Selanjutnya Kasi Sarana Prasarana Dishub Kota Bandung Ferlian Hady, Manajer Administrasi Keuangan PT Marktel Mulyana, Staf Komersil PT Marktel Ridwan Permana dan pihak swasta Wahyudi. Para saksi tersebut, menurut Ali, menjalani pemeriksaan di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IV Bandung.

(Ful)-d

MENTERI PUPR BANTAH CARİ UNTUNG

Tarif Tol Naik Jelang Mudik

JAKARTA (KR) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menepis persepsi yang menyebut penyesuaian tarif tol menjelang musim mudik Lebaran ditempuh demi mencari keuntungan. Penyesuaian tarif integrasi itu sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR Nomor 250/KPTS/M/2024 tanggal 2 Februari 2024 tentang Penyesuaian Tarif Integrasi Pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated.

Bantahan itu Basuki di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (18/3) merespons penyesuaian tarif tol menjelang musim mudik. Salah satunya tarif integrasi Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) dan Jalan Layang Mohamed Bin Zayed (MBZ) yang berlaku se-

jak 9 Maret 2024. "Oh nggak. Yang Japek itu kan sudah saya tahan 6 bulan, di aturan itu harusnya naik 6 bulan lalu," katanya.

Menurut Basuki, besaran penyesuaian tarif integrasi jarak terjauh dengan sistem terbuka pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Layang MBZ yakni Jakarta Interchange - Cikampek Golongan I Rp 27.000 dari semula Rp20.000, Golongan II dan III Rp 40.500 dari semula Rp 30.000, dan Golongan IV dan V Rp 54.000 dari semula Rp 40.500. Penyesuaian tarif tol telah diatur dalam Pasal 48 ayat (3 dan 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan yang menyebutkan bahwa penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 tahun sekali.

(Ant/Has)-d



KR-Antara/Hendra Nuridiyansyah

PEMBERSIHAN LUMUT CANDI: Pekerja membersihkan lumut pada batuan Candi Kalasan di Kalasan, Sleman, Senin (18/3/2024). Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta melakukan pembersihan lumut secara rutin untuk mencegah kerusakan relief pada batuan candi Buddha yang dibangun pada 778 M tersebut.